

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA OTONOMI  
DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI  
APBD 2001-2010**



**NASKAH PUBLIKASI ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun Oleh :**

**ANDRI SULISTYAWAN**

**B 200 080 094**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi ilmiah dengan judul :

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH  
DI KABUPATEN BOYOLALI APBD 2001-2010**

Yang ditulis oleh :

**ANDRI SULISTYAWAN**  
**B 200 080 094**

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi ilmiah tersebut telah menyetujui syarat untuk diterima.

Surakarta,    Maret 2013


Pembimbing



**(Dr. Fatchan Achyani, M.Si)**

Mengetahui  
Dekan



  
**Dr. Triyono, M.Si**

# **ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI APBD 2001-2010**

**Andri Sulistyawan**

B 200 080 094

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

## **ABSTRAKSI**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi belanja, efektifitas PAD, dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Boyolali sebelum dan sesudah otonomi daerah. Serta untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Boyolali sebelum dan sesudah Otonomi Daerah tahun 2001-2010.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio efisiensi belanja, rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari data keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2001 sampai dengan 2010 meliputi target pendapatan asli daerah, realisasi pendapatan daerah, total penerimaan daerah, anggaran belanja dan realisasi belanja daerah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari rasio efisiensi Pemerintah Daerah Boyolali dinilai telah melakukan efisiensi anggaran karena rasio efisiensinya kurang dari 100%. Hasil rasio efektifitas realisasi dan anggaran PAD pada tahun ini sebenarnya naik, tapi pencapaian untuk memenuhi target menurun hal ini disebabkan karena perolehan bagian laba usaha daerah yang berasal dari BUMN dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurun dari tahun sebelumnya dan hanya mampu merealisasikan sebesar targetnya, hal itu dapat disebabkan karena menurunnya produktifitas obyek yang dikelola. Hasil rasio kemandirian bahwa kemampuan dalam membiayai kegiatan pemerintahannya masih sangat rendah dan termasuk dalam golongan instruktif. Hasil rasio pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun rata-rata mengalami kenaikan, hasil rasio pertumbuhan jumlah pendapatan dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan, hasil rasio pertumbuhan belanja operasi naiknya Belanja Aparatur Publik dan Belanja Aparatur Daerah, hasil rasio pertumbuhan modal kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilihat dari perolehan rasio Pertumbuhan Belanja Modal semakin baik.

**Kata kunci: efesiensi belanja, efektifitas PAD, kemandirian, pertumbuhan.**

## **A. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia didasari UU No. 22 Tahun 1999 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah membawa konsekuensi pada daerah yang bersangkutan untuk melakukan penataan diberbagai segi.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam APBD.

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri laporan keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap APBD dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode selanjutnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan APBD diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam menghargai penyelenggaraan otonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya, oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideology terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi belanja, efektifitas PAD, kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah otonomi daerah kabupaten Boyolali yang diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan APBD tahun anggaran 2001-2010.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Otonomi daerah**

Ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang 32 tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah disini berhubungan dengan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Tiga dasar system hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan.

### **2. Laporan Keuangan Daerah**

Secara umum yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah dua daftar yaitu daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau rugi laba, dan pada akhir waktu ditambah daftar laba yang tidak dibagikan yang disusun oleh dua akuntan pada akhir periode. Menurut pasal 169 ayat 2 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Laporan Keuangan Daerah terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### **3. Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari Pemerintah Daerah dalam hal mengumpulkan pendapatan serta penggunaan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat luas apakah sudah tepat sasaran atau belum.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Format pada laporan keuangan mengalami banyak perubahan seiring perkembangan manajemen keuangan pada beberapa era atau zaman. (Halim, 2008)

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 58 tahun 2005, laporan keuangan terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD merupakan ruang lingkup keuangan Negara yang dikelola langsung dengan pengurusan umum, ruang lingkup yang dikelola langsung dengan pengurusan khusus adalah pengelolaan barang inventaris daerah. Ruang lingkup keuangan Negara dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dikelola langsung dan dipisahkan pengurusannya, pengelolaan ruang lingkup yang dipisahkan ini melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) (Halim, 2008:12-14).

APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah (Basuki, 2007:47-48).

#### **5. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah**

Analisis rasio keuangan adalah suatu proses yang mengidentifikasi ciri-ciri yang penting tentang keadaan keuangan dan kegiatan perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Salah satu alat ukur kinerja adalah analisis rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai konsep pengelolaan organisasi pemerintah untuk menjamin pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat luas.

Macam-macam rasio pada APBD di sini mengacu kepada dua literatur, yaitu buku yang ditulis oleh Abdul Halim dan buku yang ditulis oleh Mahmudi. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain :

##### **a. Rasio Efisiensi Belanja**

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari perhitungan rasio ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

(Mahmudi, 2007:152)

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas dirumuskan :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

(Halim, 2008:234)

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dirumuskan :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat / Provinsi dan Pinjaman}}$$

(Halim, 2008:232)

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemda dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. (Halim, 2008:241)

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, dalam hal ini mendapatkan gambaran tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali apabila ditinjau melalui analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu: Data keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2001-2010 meliputi target pendapatan asli daerah, realisasi pendapatan asli daerah, total penerimaan daerah, anggran belanja dan realisasi belanja daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Data yang berasal dari APBD dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio keuangan dan Analisis Pebandingan

#### **D. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Rasio Efisiensi**

Hasil perhitungan Rasio Efisiensi Belanja sebagai berikut

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100$$



**TABEL 4.1**  
**RASIO PERHITUNGAN RASIO EFISIENSI BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**TAHUN ANGGARAN 2001-2010**

Uraian	Tahun Anggaran				
	2001	2002	2003	2004	2005
Realisasi Belanja	242,887,417,920.08	287,361,442,000.00	390,543,661,686.00	395,842,549,618.00	427,428,312,570.00
Anggaran Belanja	246,541,295,000.00	313,361,442,000.00	406,869,304,229.00	419,488,842,642.00	455,334,968,449.00
Rasio Efisiensi Belanja Daerah	98.52%	91.70%	95.99%	94.36%	93.87%

Sumber: Bagian Akuntansi DPPKAD Kabupaten Boyolali (Data Diolah)

Uraian	Tahun Anggaran				
	2006	2007	2008	2009	2010
Realisasi Belanja	530,077,207,239.00	738,405,469,348.00	793,262,107,869.00	808,017,387,034.00	912,584,586,077.00
Anggaran Belanja	761,384,845,301.00	811,613,230,000.00	845,747,630,000.00	892,987,309,000.00	991,399,517,628.00
Rasio Efisiensi Belanja Daerah	94.42%	90.98%	93.79%	90.48%	92.05%

Sumber: Bagian Akuntansi DPPKAD Kabupaten Boyolali (Data Diolah)

Hasil perhitungan Rasio Efisiensi dapat dilihat bahwa pada Tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 diperoleh Rasio Efisiensi Belanja Daerah sebesar 98.52%, 91.70%, 95.99%, 94.36%, 93.87%, 94,42%, 90.98%, 93.79%, 90.48%, dan 92.05%. Hal ini berarti belanja pemda Kabupaten Boyolali tahun 2002, 2005, 2007 dan 2009 relative lebih efisien dibandingkan tahun 2001, 2003, 2004, 2006, 2008 dan 2010. Pemda Kabupaten Boyolali dinilai telah melakukan efisiensi anggaran karena rasio efisiensinya kurang dari 100%.

## **2. Rasio Efektifitas Belanja Asli Daerah**

Hasil perhitungan Rasio Efektifitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

**TABEL 4.2**  
**HASIL PERHITUNGAN RASIO EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**TAHUN ANGGARAN 2001 – 2010**

Uraian	Tahun Anggaran				
	2001	2002	2003	2004	2005
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	2,989,750,308.00	4,334,366,800.00	5,820,775,186.00	7,244,100,746.00	6,984,060,197.00
Target Penerimaan Pajak Daerah	2,953,625,000.00	3,679,918,000.00	5,686,644,000.00	6,050,735,000.00	6,676,973,800.00
Rasio Efektivitas Pajak Daerah	101.22%	117.78%	102.36%	119.72%	104.60%

Sumber: Bagian Akuntansi DPPKAD Kabupaten Boyolali (Data Diolah)

Uraian	Tahun Anggaran				
	2006	2007	2008	2009	2010
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	9,442,747,838.00	10,643,172,280.00	11,155,035,906.00	12,896,540,751.00	14,094,132,345.00
Target Penerimaan Pajak Daerah	8,883,228,000.00	9,642,340,000.00	10,649,690,000.00	10,719,190,000.00	12,637,835,000.00
Rasio Efektivitas Pajak Daerah	106.30%	110.38%	104.75%	120.31%	111.52%

Sumber: Bagian Akuntansi DPPKAD Kabupaten Boyolali (Data Diolah)

Pada tahun 2001 PAD Kabupaten Boyolali dapat terealisasi sebesar 101,22%, tahun 2002 naik ke prosentase angka 117,78%, tahun 2003 turun ke prosentase angka 102,36%, tahun 2004 naik ke prosentase 119,72%, tahun 2005 turun ke prosentase 104,60, tahun 2006 naik ke prosentase 106,30%, tahun 2007 naik ke prosentase 110,38%, tahun 2008 menurun ke prosentase 104,75%, tahun 2009 naik ke prosentase 120,31% dan tahun 2010 turun ke prosentase angka 111,52%. Realisasi dan anggaran PAD pada tahun ini sebenarnya naik, tapi pencapaian untuk memenuhi target menurun hal ini disebabkan karena perolehan bagian laba usaha daerah yang berasal dari BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurun dari tahun sebelumnya dan hanya mampu merealisasikan sebesar targetnya, hal itu dapat disebabkan karena menurunnya produktifitas obyek yang dikelola.

### **3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**TABEL 4.3**  
**HASIL PERHITUNGAN RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2001 – 2010**

TA	Total Pendapatan	PAD		%	Transfer Pusat/Propinsi/Pinjaman		%	Rasio Kemandirian
		Rp	Perkembangan		Rp	Perkembangan		
2001	257,634,487,598.08	17,675,166,687.00	-	6.86%	228,823,749,973.00	-	88.82%	7.72%
2002	325,257,088,835.00	24,460,325,829.00	38.39%	7.52%	272,355,306,951.00	19.02%	83.74%	8.98%
2003	389,246,882,291.00	32,781,305,308.00	34.02%	8.42%	329,494,440,647.00	20.98%	84.65%	9.95%
2004	403,042,399,325.00	36,964,029,477.00	12.76%	9.17%	343,880,291,928.00	4.37%	85.32%	10.75%
2005	439,245,327,765.00	49,816,906,083.00	34.77%	11.34%	366,646,406,509.00	6.62%	83.47%	13.59%
2006	630,290,112,803.00	59,307,283,906.00	19.05%	9.41%	568,245,881,577.00	54.98%	90.16%	10.44%
2007	707,982,739,188.00	67,461,523,228.00	13.75%	9.53%	625,619,669,612.00	10.10%	88.37%	10.78%
2008	782,528,354,413.00	63,733,408,461.00	-5.53%	8.14%	699,147,168,702.00	11.75%	89.34%	9.12%
2009	836,169,374,817.00	70,004,658,137.00	9.84%	8.37%	745,921,666,680.00	6.69%	89.21%	9.38%
2010	917,898,637,498.00	86,485,635,223.00	23.54%	9.42%	806,875,997,275.00	8.1%	78.90%	10.72%
Rata-rata			16.69%	8.65%		7.43%	88.82%	9.74%

Sumber: Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Boyolali (Data Diolah)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, Rasio Kemandirian Tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 selalu mengalami kenaikan yaitu sebesar 7.72%, 8.98%, 9.95%, 10.75%, 13.59%, 10.44%, 10.78%, 9.12%, 9.63%, dan 12,05%. Hal ini berarti bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam membiayai kegiatan pemerintahannya masih sangat rendah dan termasuk dalam golongan instruktif.

#### **4. Rasio Pertumbuhan**

##### **a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.

Hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}}$$

##### **b. Rasio Pertumbuhan Jumlah Pendapatan**

Rasio Pertumbuhan Jumlah Pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.

Hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Pertumbuhan Jumlah Pendapatan} \\ &= \frac{\text{Realisasi Jumlah Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Jumlah Pendapatan } X_{n-1}} \end{aligned}$$

##### **c. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi**

Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif.

Hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Operasi } X_{n-1}}$$

**d. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal**

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif.

Hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Modal } X_{n-1}}$$

**TABEL 4.4**  
**HASIL PERHITUNGAN RASIO PERTUMBUHAN KABUPATEN BOYOLALI**  
**TAHUN ANGGARAN 2001 – 2010**

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Realisasi Penerimaan PAD	17,675,166,687.00	24,460,325,829.00	32,781,305,308.00	36,964,029,477.00	49,816,906,083.00
2	Realisasi Jml Pendapatan	257,634,487,598.08	325,257,088,835.00	389,246,882,291.00	403,042,399,325.00	439,245,327,765.00
3	Realisasi Belanja Operasi	212,057,961,813.08	234,114,107,220.00	23,942,100,413.00	22,431,878,154.00	26,947,013,984.00
4	Realisasi Belanja Modal	52,997,924,051.00	30,829,456,107.00	63,449,639,378.00	37,993,418,721.00	54,363,860,693.00
5	Rasio Pertumbuhan PAD	-	38.39%	34.02%	12.76%	34.77%
6	Rasio Pertumbuhan Jml Pendapatan	-	26.25%	19.67%	3.54%	8.98%
7	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi	-	10.40%	-89.77%	-6.31%	20.13%
8	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	-	-41.83%	105.81%	-40.12%	43.09%

Sumber: Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Boyolali (data diolah)

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Realisasi Penerimaan PAD	59,307,283,906.00	67,461,523,228.00	63,733,408,461.00	70,004,658,137.00	86,485,635,223.00
2	Realisasi Jml Pendapatan	630,290,112,803.00	707,982,739,188.00	782,528,354,413.00	836,169,374,817.00	917,898,637,498.00
3	Realisasi Belanja Operasi	48,134,475,908.00	576,841,666,099.00	663,115,703,998.00	713,725,383,770.00	806,507,488,699.00
4	Realisasi Belanja Modal	63,850,701,288.00	158,110,276,058.00	124,533,005,357.00	86,596,626,087.00	100,101,216,583.00
5	Rasio Pertumbuhan PAD	19.05%	13.75%	-5.53%	9.84%	23.54%
6	Rasio Pertumbuhan Jml Pendapatan	43.49%	12.33%	10.53%	6.85%	9.77%
7	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi	78.63%	10.98%	14.96%	7.63%	13.00%
8	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	17.45%	147.62%	-21.24%	-30.46%	15.59%

Sumber: Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Boyolali (data diolah)



a. Rasio Pertumbuhan PAD

Pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 diperoleh Rasio pertumbuhan PAD di tahun 2002 sebesar 38.39%, tahun 2003 sebesar 34.02%, tahun 2004 sebesar 12.76%, tahun 2005 sebesar 34.77%, tahun 2006 sebesar 19.05%, tahun 2007 sebesar 13.75%, tahun 2008 sebesar -5.53%, tahun 2009 sebesar 9.84% dan tahun 2010 sebesar 23.54%. Hal ini berarti dari tahun ke tahun Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali rata-rata mengalami kenaikan.

b. Rasio Pertumbuhan Jumlah Pendapatan

Pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 diperoleh rasio pertumbuhan jumlah pendapatan tahun 2002 sebesar 26.25%, tahun 2003 sebesar 19.67%, tahun 2004 sebesar 3.54%, tahun 2005 sebesar 8.98%, tahun 2006 sebesar 43.49%, tahun 2007 sebesar 12.33%, tahun 2008 sebesar 10.53%, tahun 2009 sebesar 6.85%, tahun 2010 sebesar 9.77%. Hal ini berarti dari tahun ke tahun Pendapatan di Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan.

c. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi

Pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 diperoleh rasio pertumbuhan belanja operasi tahun 2002 sebesar 10.40%, tahun 2003 sebesar -89.77%, tahun 2004 sebesar -6.31%, tahun 2005 sebesar 20.13%, tahun 2006 sebesar 78.63%, tahun 2007 sebesar 10.98%, tahun 2008 sebesar 14.96%, tahun 2009 sebesar 7.63% dan tahun 2010 sebesar 13.00%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh naiknya Belanja Aparatur Publik dan Belanja Aparatur Daerah.

d. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

Pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 diperoleh rasio pertumbuhan belanja modal tahun 2002 sebesar -41.83%, tahun 2003 sebesar 105.81%, tahun 2004 sebesar -40.12%, tahun 2005 sebesar 43.09%, tahun 2006 sebesar 17.45%, tahun 2007 sebesar 147.62%, tahun 2008 sebesar -21.24%, tahun 2009 sebesar -30.46%, tahun 2010 sebesar 15.59%. Hal ini berarti kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Boyolali dilihat dari perolehan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal semakin baik.

## **5. Analisis Perbandingan**

### **a. Rasio Efisiensi Belanja**

Dilihat dari rata-ratanya sesudah otonomi daerah Pemda Kabupaten Boyolali lebih melakukan efisiensi anggaran yaitu 92.34%, dibandingkan sebelum otonomi daerah yaitu rata-ratanya sebesar 94.88%.

### **b. Rasio Efektifitas PAD**

Kinerja keuangan dari segi rasio efektifitas PAD yang lebih baik adalah sesudah otonomi daerah yaitu rata-ratanya 110.65% dibandingkan dengan efektifitas PAD sebelum otonomi daerah yaitu rata-ratanya 109.13%. Disebabkan karena rata-rata setiap tahunnya telah menunjukkan prosentase yang menandakan kalau PAD Kabupaten Boyolali telah efektif antara besarnya target dan realisasinya.

### **c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian paling baik adalah sebelum otonomi daerah yaitu dengan rata-rata pergerakan rasio sebesar 10.19%, Dibandingkan dengan sesudah otonomi daerah yaitu pergerakan rasionya sebesar 10.08%. Hal ini disebabkan kinerja untuk tidak bergantung dengan dana dari pihak eksternal paling kecil.

### **d. Rasio Pertumbuhan**

Rasio Pertumbuhan yang cenderung naik dari tahun ke tahun baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah menandakan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Boyolali dan Profesionalitas Kabupaten Boyolali dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dicapai dengan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu ditingkatkan.

## **E. SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dengan menggunakan rasio menunjukkan bahwa rasio efisiensi Pemda Kabupaten Boyolali dinilai telah melakukan efisiensi anggaran karena rasionya kurang dari 100%. Rasio efektifitas PAD realisasi

dan anggaran PAD pada tahun ini sebenarnya naik, tapi pencapaian untuk memenuhi target menurun karena perolehan bagian laba usaha daerah yang berasal dari BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurun dari tahun sebelumnya dan hanya mampu merealisasikan sesuai targetnya. Rasio kemandirian Pemerintah Boyolali Kabupaten Boyolali dalam membiayai kegiatan pemerintahannya masih sangat rendah dan termasuk dalam golongan instruktif. Rasio pertumbuhan yang cenderung naik dari tahun ke tahun baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah menandakan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Boyolali dan Profesionalitas Kabupaten Boyolali dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Untuk penelitian berikutnya disarankan untuk mengambil tahun penelitian yang lebih panjang, analisis rasionya tidak hanya menggunakan seperti penelitian ini, tetapi menggunakan rasio lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Bastian, Indra, 2001. *Manual Akuntansi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: PPA FE-UGM.

\_\_\_\_\_. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta Erlangga

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

\_\_\_\_\_. 2008. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cetakan ke 2, Jogjakarta: BPFE

Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset

\_\_\_\_\_. 2005. *Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi*.

- Munawir. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ke 14, Yogyakarta: Liberty.
- Ningrum, Diyati Tawang. 2007. "*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2005-2007*". Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang *Belanja daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang *Restribusi Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Laporan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Pendapatan Daerah*.
- Rasul, Sjahruddin. 2008. *Akuntabilitas Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Akuntansi Tahun : XII, No 03, September. Universitas Bung Hatta. Padang.
- Ronald, Andreas dan Dwi Sarmiyatiningsih. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 1, No. 1, Juni. Universitas Janabadra.
- Sularmi dan Agus Endro Suwarno. 2006. *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau Aspek Keuangan*. JAK Vol 5, No 1, April. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo Hari Adi. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah)*. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.

- Todaro, P Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12. Tahun 2008. Tentang Pemerintah Daerah*.
- Wirawan, Setiaji dan Priyo Hari Adi. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional ke-10 Makassar 26-28 Juli.